



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN CARINGIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 81);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CARINGIN TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 81) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 106

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 106 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 81  
TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN CARINGIN  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

|  |   |
|--|---|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 1 |
|--|---|

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

|  |   |
|--|---|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 2 |
|--|---|

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

|   |   |
|---|---|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 3 |
|---|---|

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

|  |   |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 4 |

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

|   |   |
|---|---|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 6 |
|---|---|

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut

Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 81);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 8 |

## 2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan

|  |   |
|--|---|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 9 |
|--|---|

dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 10 |

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

**2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra**

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 11 |
|--|----|

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program**  
**Renstra SKPD/Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

| URUSAN DAN PROGRAM<br>1  | PAGU INDIKATIF<br>RENSTRA TAHUN<br>2023<br>2 | % REALISASI<br>RENSTRA<br>TAHUN 2023<br>3 | REALISASI APBD TW II<br>TAHUN 2023<br>4 |
|--|--|---|---|
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>   | <b>2.235.864.232</b>                         | <b>46,03%</b>                             | <b>1.029.128.478</b>                    |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>               | <b>1.689.103.132</b>                         | <b>46,74%</b>                             | <b>789.464.478</b>                      |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>14.909.600</b>                            | <b>48,86%</b>                             | <b>7.284.800</b>                        |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 8.464.800                                    | 9,92%                                     | 840.000                                 |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 6.444.800                                    | 100%                                      | 6.444.800                               |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>1.393.886.332</b>                         | <b>48,68%</b>                             | <b>678.490.578</b>                      |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 1.387.125.432                                | 48,91%                                    | 678.490.578                             |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD         | 6.760.900                                    | 0%  | 0                                       |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | 16.273.000                                   | 38,55%                                    | 6.273.000                               |
| Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              | 6.273.000                                    | 100%                                      | 6.273.000                               |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | 10.000.000                                   | 0%  | 0                                       |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>176.138.900</b>                           | <b>44,79%</b>                             | <b>78.892.200</b>                       |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | 8.665.200                                    | 58,61%                                    | 5.079.000                               |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 50.650.200                                   | 55,01%                                    | 27.861.300                              |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 7.094.900                                    | 35,38%                                    | 4.638.300                               |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | 6.003.600                                    | 51,93%                                    | 3.117.600                               |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 3.254.400                                    | 41,67%                                    | 1.356.000                               |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 47.300.000                                   | 40,00%                                    | 18.920.000                              |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat   | 35.660.000                                   | 50,25%                                    | 17.920.000                              |

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 12 |
|--|----|

| <b>URUSAN DAN PROGRAM</b><br><b>1</b>  | <b>PAGU INDIKATIF</b><br><b>RENSTRA TAHUN</b><br><b>2023</b><br><b>2</b> | <b>% REALISASI</b><br><b>RENSTRA</b><br><b>TAHUN 2023</b><br><b>3</b> | <b>REALISASI APBD TW II</b><br><b>TAHUN 2023</b><br><b>4</b> |
|--|--|---|--|
| Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |   |  |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 17.510.600   | 0%  | 0  |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>30.050.300</b>  | <b>44,16%</b>   | <b>13.270.100</b>  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 9.000.000  | 50,00%  | 4.500.000  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 5.390.000  | 47,31%  | 2.550.000  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 15.660.300   | 39,72%  | 6.220.100  |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>57.845.000</b>  | <b>9,08%</b>  | <b>5.253.800</b>   |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 8.834.200  | 59,47%  | 5.253.800  |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 49.010.800   | 0%  | 0  |
| <b>PROGRAM</b><br><b>PENYELENGGARAAN</b><br><b>PEMERINTAHAN DAN</b><br><b>PELAYANAN PUBLIK</b>                                     | <b>104.751.400</b>   | <b>17,95%</b>   | <b>18.801.800</b>  |
| <b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>94.751.400</b>  | <b>14,09%</b>   | <b>13.350.500</b>  |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 94.751.400   | 14,09%  | 13.350.500   |
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | <b>10.000.000</b>  | <b>54,51%</b>   | <b>5.451.300</b>   |
| Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 10.000.000   | 54,51%  | 5.451.300  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>48.211.700</b>  | <b>48,77%</b>   | <b>23.515.100</b>  |
| <b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>17.011.700</b>  | <b>61,81%</b>   | <b>10.515.100</b>  |
| Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                             | 7.011.500  | 100%  | 7.011.500  |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 10.000.200   | 35,04%  | 3.503.600  |

|   |    |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 13 |
|---|----|

| <b>URUSAN DAN PROGRAM</b><br><b>1</b>  | <b>PAGU INDIKATIF</b><br><b>RENSTRA TAHUN</b><br><b>2023</b><br><b>2</b> | <b>% REALISASI</b><br><b>RENSTRA</b><br><b>TAHUN 2023</b><br><b>3</b> | <b>REALISASI APBD TW II</b><br><b>TAHUN 2023</b><br><b>4</b> |
|--|--|---|--|
| <b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>   | <b>31.200.000</b>  | <b>41,67%</b>   | <b>13.000.000</b>  |
| Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan   | 31.200.000   | 41,67%  | 13.000.000   |
| <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>252.531.700</b>   | <b>54,87%</b>   | <b>138.568.400</b>   |
| <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>235.561.100</b>   | <b>55,36%</b>   | <b>130.411.200</b>   |
| Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | 186.980.000  | 49,74%  | 93.000.000   |
| Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 48.581.100   | 77,01%  | 37.411.200   |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 16.970.600   | 48,07%  | 8.157.200  |
| Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | 16.970.600   | 48,07%  | 8.157.200  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>86.189.700</b>  | <b>28,53%</b>   | <b>24.590.700</b>  |
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>86.189.700</b>  | <b>28,53%</b>   | <b>24.590.700</b>  |
| Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.000.100   | 0%  | 0  |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 71.189.600   | 34,54%  | 24.590.700   |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | <b>55.076.600</b>  | <b>62,07%</b>   | <b>34.188.000</b>  |
| <b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan</b>   | <b>55.076.600</b>  | <b>62,07%</b>   | <b>34.188.000</b>  |

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 14 |
|--|----|

| <b>URUSAN DAN PROGRAM</b><br><b>1</b>   | <b>PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023</b><br><b>2</b> | <b>% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023</b><br><b>3</b> | <b>REALISASI APBD TW II TAHUN 2023</b><br><b>4</b> |
|---|--|---|--|
| <b>Desa</b>   |  |   |  |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                             | 15.001.700   | 68,26%  | 10.240.100   |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 25.074.800   | 35,68%  | 8.947.800  |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | 15.000.100   | 100%  | 15.000.100   |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>2.235.864.232</b>                                 | <b>46,03%</b>                                     | <b>1.029.128.478</b>                               |

Sumber : Perubahan RENSTRA Kecamatan Caringin Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. **2.235.864.232,00** melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.029.128.478,00** atau sebesar 46,03%.

## 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

### 2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran**  
**RENJA Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**Sampai Triwulan II Tahun 2023**

| <b>Nama Urusan dan Program</b><br><b>1</b>                                       | <b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b><br><b>2</b> | <b>% Realisasi thd Renja</b><br><b>3</b> | <b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b><br><b>4</b> |
|--|--|--|--|
| <b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>           | <b>2.235.864.232</b>   | <b>46,03%</b>                            | <b>1.029.128.478</b>   |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>               | <b>1.689.103.132</b>   | <b>46,74%</b>                            | <b>789.464.478</b>   |
| <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>14.909.600</b>  | <b>48,86%</b>                            | <b>7.284.800</b>   |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat                            | 8.464.800  | 9,92%                                    | 840.000  |

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 15 |
|--|----|

| <b>Nama Urusan dan Program</b>  | <b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b> | <b>% Realisasi thd Renja</b> | <b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b> |
|---|--|------------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                     | <b>4</b>   |
| Daerah  |  |                              |  |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 6.444.800  | 100%                         | 6.444.800  |
| <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                        | <b>1.393.886.332</b>   | <b>48,68%</b>                | <b>678.490.578</b>                                     |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 1.387.125.432  | 48,91%                       | 678.490.578  |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 6.760.900  | 0%                           | 0  |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | 16.273.000   | 38,55%                       | 6.273.000  |
| Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | 6.273.000  | 100%                         | 6.273.000  |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 10.000.000   | 0%                           | 0  |
| <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>176.138.900</b>   | <b>44,79%</b>                | <b>78.892.200</b>                                      |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.665.200  | 58,61%                       | 5.079.000  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 50.650.200   | 55,01%                       | 27.861.300   |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 7.094.900  | 35,38%                       | 4.638.300  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 6.003.600  | 51,93%                       | 3.117.600  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 3.254.400  | 41,67%                       | 1.356.000  |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 47.300.000   | 40,00%                       | 18.920.000   |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 35.660.000   | 50,25%                       | 17.920.000   |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | 17.510.600   | 0%                           | 0  |
| <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>30.050.300</b>  | <b>44,16%</b>                | <b>13.270.100</b>                                      |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 9.000.000  | 50,00%                       | 4.500.000  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | 5.390.000  | 47,31%                       | 2.550.000  |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 15.660.300   | 39,72%                       | 6.220.100  |

| <b>Nama Urusan dan Program</b>   | <b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b> | <b>% Realisasi thd Renja</b> | <b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b> |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                     | <b>4</b>   |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>57.845.000</b>  | <b>9,08%</b>                 | <b>5.253.800</b>                                       |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 8.834.200  | 59,47%                       | 5.253.800  |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 49.010.800   | 0%                           | 0  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>104.751.400</b>   | <b>17,95%</b>                | <b>18.801.800</b>                                      |
| <b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>94.751.400</b>  | <b>14,09%</b>                | <b>13.350.500</b>                                      |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 94.751.400   | 14,09%                       | 13.350.500   |
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | <b>10.000.000</b>  | <b>54,51%</b>                | <b>5.451.300</b>                                       |
| Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 10.000.000   | 54,51%                       | 5.451.300  |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <b>48.211.700</b>  | <b>48,77%</b>                | <b>23.515.100</b>                                      |
| <b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>17.011.700</b>  | <b>61,81%</b>                | <b>10.515.100</b>                                      |
| Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                             | 7.011.500  | 100%                         | 7.011.500  |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 10.000.200   | 35,04%                       | 3.503.600  |
| <b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>                                     | <b>31.200.000</b>  | <b>41,67%</b>                | <b>13.000.000</b>                                      |
| Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan   | 31.200.000   | 41,67%                       | 13.000.000   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | <b>17</b> |
|--|-----------|

| <b>Nama Urusan dan Program</b>   | <b>Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)</b> | <b>% Realisasi thd Renja</b> | <b>Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)</b> |
|--|--|------------------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>                     | <b>4</b>   |
| <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b>252.531.700</b>   | <b>54,87%</b>                | <b>138.568.400</b>                                     |
| <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>235.561.100</b>   | <b>55,36%</b>                | <b>130.411.200</b>                                     |
| Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | 186.980.000  | 49,74%                       | 93.000.000   |
| Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 48.581.100   | 77,01%                       | 37.411.200   |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 16.970.600   | 48,07%                       | 8.157.200  |
| Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  | 16.970.600   | 48,07%                       | 8.157.200  |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>86.189.700</b>  | <b>28,53%</b>                | <b>24.590.700</b>                                      |
| <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>86.189.700</b>  | <b>28,53%</b>                | <b>24.590.700</b>                                      |
| Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.000.100   | 0%                           | 0  |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 71.189.600   | 34,54%                       | 24.590.700   |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  | <b>55.076.600</b>  | <b>62,07%</b>                | <b>34.188.000</b>                                      |

| Nama Urusan dan Program   | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|---|---|-----------------------|---|
| 1   | 2   | 3                     | 4   |
| <b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>55.076.600</b>   | <b>62,07%</b>         | <b>34.188.000</b>                               |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                       | 15.001.700  | 68,26%                | 10.240.100                                      |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan           | 25.074.800  | 35,68%                | 8.947.800                                       |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                           | 15.000.100  | 100%                  | 15.000.100                                      |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>2.235.864.232</b>  | <b>46,03%</b>         | <b>1.029.128.478</b>                            |

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah **25,33%**. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

### 2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah **27,82% untuk target kinerja, dan 25,33%** untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Caringin Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut:

|   |    |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 19 |
|---|----|

**Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Caringin Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Caringin**

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcomes)/<br>Kegiatan<br>(output) | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>daerah)<br>Tahun<br>2024 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja<br>Hasil<br>Program<br>dan<br>Keluaran<br>Kegiatan<br>s/d<br>tahun<br>2022 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun Lalu<br>(2022) |  |                             | Target<br>program<br>dan<br>kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2023) | Perkiraan Realisasi<br>Capaian Target Renstra<br>Perangkat Daerah s/d<br>tahun berjalan           |  |
|------|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|---|---|--|
|      |   |  |  |   | Target<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Tahun<br>2022                   | Realisasi<br>Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun<br>2022 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |   | Realisasi<br>Capaian<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>s/d<br>tahun<br>berjalan<br>(tahun<br>2023) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra 2023<br>(%) |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   | (6)   | (7)  | (8)                         | (9)   | (10)  | (11)   |
| 7    | Unsur Kewilayahan   |  |  |   |   |  |                             |   |   |  |
| 7 01 | Kecamatan   |  |  |   |   |  |                             |   |   |  |

|   |    |    |     |    |   |   |             |               |                      |                      |              |             |                      |            |
|---|----|----|-----|----|---|---|-------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| 7 | 01 | 01 |     |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>   | <b>100%</b> | <b>95,46%</b> | <b>1.639.120.466</b> | <b>1.564.669.577</b> | <b>95,46</b> | <b>100%</b> | <b>1.680.192.840</b> | <b>100</b> |
| 7 | 01 | 01 | 201 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b>   | <b>11.846.250</b>    | <b>11.846.250</b>    | <b>100</b>   | <b>100%</b> | <b>15.887.000</b>    | <b>100</b> |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 100%        | 100%          | 7.483.300            | 7.483.300            | 100          | 100%        | 9.442.200            | 100        |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 100%        | 100%          | 4.362.950            | 4.362.950            | 100          | 100%        | 6.444.800            | 100        |
| 7 | 00 | 00 | 20  |    | <b>Administrasi</b>   | <b>Jumlah</b>   | <b>100%</b> | <b>95,29%</b> | <b>1.363.573.</b>    | <b>1.299.408.</b>    | <b>95,29</b> | <b>100%</b> | <b>1,371,45</b>      | <b>100</b> |

|   |    |    |     |    |   |  |             |               |                   |                  |              |             |                  |            |
|---|----|----|-----|----|---|--|-------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|------------|
|   | 1  | 1  | 2   |    | <b>Keuangan Perangkat Daerah</b>                            | <b>laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>  |             |               | 410               | 173              |              |             | 6,640            |            |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 100%        | 95,27%        | 1.356.395.310     | 1.292.230.073    | 95,27        | 100%        | 1.363.466.740    | 100        |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100%        | 100%          | 7.178.100         | 7.178.100        | 100          | 100%        | 7.989.900        | 100        |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 05 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>            | <b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>100%</b> | <b>27,80%</b> | <b>13.851.000</b> | <b>3.851.000</b> | <b>27,80</b> | <b>100%</b> | <b>6,273,000</b> | <b>100</b> |

|   |    |    |     |    |  |   |             |               |                    |                    |              |             |                    |            |
|---|----|----|-----|----|--|---|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 205 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 100%        | 100%          | 3.851.000          | 3.851.000          | 100          | 100%        | 6.273.000          | 100        |
| 7 | 01 | 01 | 205 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100%        | 0%            | 10.000.000         | 0                  | 0            | 0%          | 0                  | 0          |
| 7 | 01 | 01 | 206 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>100%</b> | <b>99,99%</b> | <b>161.889.856</b> | <b>161.869.004</b> | <b>99,99</b> | <b>100%</b> | <b>198,680,900</b> | <b>100</b> |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang             | 100%        | 100%          | 7.851.600          | 7.851.600          | 100          | 100%        | 8.665.200          | 100        |

|   |    |    |     |    |  |  |      |        |            |            |       |      |            |     |
|---|----|----|-----|----|--|--|------|--------|------------|------------|-------|------|------------|-----|
|   |    |    |     |    |  | Disediakan   |      |        |            |            |       |      |            |     |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100% | 99,98% | 39.226.050 | 39.220.150 | 99,98 | 100% | 73,192,200 | 100 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 03 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 100% | 99,78% | 6.942.756  | 6.927.804  | 99,78 | 100% | 7,094,900  | 100 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan      | 100% | 100%   | 4.868.950  | 4.868.950  | 100   | 100% | 6,003,600  | 100 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan                      | 100% | 100%   | 5.080.500  | 5.080.500  | 100   | 100% | 3,254,400  | 100 |

|   |    |    |     |    |   |   |             |               |                   |                   |              |           |            |          |
|---|----|----|-----|----|---|---|-------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------|
|   |    |    |     |    |   | Perundang-Undangan yang Disediakan                                  |             |               |                   |                   |              |           |            |          |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 100%        | 100%          | 48.000.000        | 48.000.000        | 100          | 100%      | 47,300,000 | 100      |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100%        | 100%          | 49.920.000        | 49.920.000        | 100          | 100%      | 35,660,000 | 100      |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD                | 100%        | 0%            | 0                 | 0                 | 0            | 100%      | 17,510,600 | 100      |
| 7 | 01 | 01 | 207 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>       | <b>100%</b> | <b>97,91%</b> | <b>12.699.800</b> | <b>12.435.000</b> | <b>97,91</b> | <b>0%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

|          |           |           |            |    |   |  |             |             |                   |                   |            |             |                   |            |
|----------|-----------|-----------|------------|----|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|          |           |           |            |    |   | <b>Urusan Pemerintah Daerah</b>  |             |             |                   |                   |            |             |                   |            |
| 7        | 01        | 01        | 207        | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia   | 100%        | 97,91%      | 12.699.800        | 12.435.000        | 97,91      | 0%          | 0                 | 0          |
| <b>7</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>208</b> |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>23.810.200</b> | <b>23.810.200</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>30,050,300</b> | <b>100</b> |
| 7        | 01        | 01        | 208        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100%        | 100%        | 7.800.000         | 7.800.000         | 100        | 100%        | 9.000.000         | 100        |
| 7        | 01        | 01        | 208        | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           | Jumlah Laporan Penyediaan  | 100%        | 100%        | 3.570.000         | 3.570.000         | 100        | 100%        | 5,390,000         | 100        |

|   |    |    |     |    |  |   |             |             |                   |                   |            |             |                   |            |
|---|----|----|-----|----|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|   |    |    |     |    |  | Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                      |             |             |                   |                   |            |             |                   |            |
| 7 | 01 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                        | 100%        | 100%        | 12.440.200        | 12.440.200        | 100        | 100%        | 15,660,300        | 100        |
| 7 | 01 | 01 | 209 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                         | <b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>51.449.950</b> | <b>51.449.950</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>57,845,000</b> | <b>100</b> |
| 7 | 01 | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas                                      | 100%        | 100%        | 7.560.200         | 7.560.200         | 100        | 100%        | 8.834.200         | 100        |

|   |    |    |     |    |  |  |             |             |                    |                    |            |             |                    |            |
|---|----|----|-----|----|--|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------|------------|
|   |    |    |     |    | Dinas Jabatan  | Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |             |             |                    |                    |            |             |                    |            |
| 7 | 01 | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi  | 100%        | 100%        | 43.889.750         | 43.889.750         | 100        | 100%        | 49,010,800         | 100        |
| 7 | 01 | 02 |     |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> | <b>Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>114.704.600</b> | <b>114.704.600</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>104.751.400</b> | <b>100</b> |
| 7 | 01 | 02 | 201 |    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di              | Jumlah laporan Koordinasi Penyeleng  | 100%        | 100%        | 107.539.000        | 107.539.000        | 100        | 100%        | 94.751.400         | 100        |

|   |    |    |     |    | <b>Tingkat Kecamatan</b>  | <b>uraan Kegiatan Pemerintah an tingkat Kecamatan</b>                             |      |      |             |             |     |      |            |     |
|---|----|----|-----|----|---|---|------|------|-------------|-------------|-----|------|------------|-----|
| 7 | 01 | 02 | 201 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 107.539.000 | 107.539.000 | 100 | 100% | 94.751.400 | 100 |
| 7 | 01 | 02 | 202 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | <b>Persentase Penyelenggaraan PATEN</b>   | 100% | 100% | 7.165.600   | 7.165.600   | 100 | 100% | 10,000,000 | 100 |
| 7 | 01 | 02 | 202 | 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | Jumlah Dokumen Perencanaaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan     | 100% | 100% | 7.165.600   | 7.165.600   | 100 | 100% | 10,000,000 | 100 |

|   |    |    |     |    |   |  |      |      |           |           |     |      |            |     |
|---|----|----|-----|----|---|--|------|------|-----------|-----------|-----|------|------------|-----|
| 7 | 01 | 03 |     |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                 | <b>Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>                                     | 100% | 100% | 5.799.700 | 5.799.700 | 100 | 100% | 32,611,700 | 100 |
| 7 | 01 | 03 | 201 |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>  | 100% | 100% | 5.799.700 | 5.799.700 | 100 | 100% | 32,611,700 | 100 |
| 7 | 01 | 03 | 201 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100% | 100% | 5.799.700 | 5.799.700 | 100 | 100% | 7.011.500  | 100 |
| 7 | 01 | 03 | 201 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya   | 100% | 0%   | 0         | 0         | 0   | 100% | 10,000,200 | 100 |

|   |    |    |     |    |   |   |      |      |             |             |     |      |             |     |
|---|----|----|-----|----|---|---|------|------|-------------|-------------|-----|------|-------------|-----|
|   |    |    |     |    |   | an Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      |      |      |             |             |     |      |             |     |
| 7 | 01 | 03 | 205 | 02 | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b> | <b>Jumlah Laporan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan</b> | 100% | 0%   | 0           | 0           | 0   | 100% | 15.600.000  | 100 |
| 7 | 01 | 03 | 205 | 02 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                     | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan        | 100% | 0%   | 0           | 0           | 0   | 100% | 15.600.000  | 100 |
| 7 | 01 | 04 |     |    | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                             | <b>Persentasi penanganan gangguan Trantibum</b>                         | 100% | 100% | 203.522.800 | 203.522.800 | 100 | 100% | 253,383,100 | 100 |
| 7 | 01 | 04 | 201 |    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>              | <b>Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum</b>                     | 100% | 100% | 189.930.000 | 189.930.000 | 100 | 100% | 236.412.500 | 100 |

|   |    |    |     |    |   |  |             |             |                   |                   |            |             |                   |            |
|---|----|----|-----|----|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
| 7 | 01 | 04 | 201 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 100%        | 100%        | 189.930.000       | 189.930.000       | 100        | 100%        | 236.412.500       | 100        |
| 7 | 01 | 04 | 201 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | 100%        | 0%          | 0                 | 0                 | 0          | 100%        | 48,581,100        | 100        |
| 7 | 01 | 04 | 202 |    | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>  | <b>Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>13.592.800</b> | <b>13.592.800</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>16,970,600</b> | <b>100</b> |

|   |    |    |     |    |  |  |             |             |                    |                    |            |             |                   |            |
|---|----|----|-----|----|--|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|   |    |    |     |    |  | <b>Peraturan Daerah dan Perkada</b>  |             |             |                    |                    |            |             |                   |            |
| 7 | 01 | 04 | 202 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara | 100%        | 100%        | 13.592.800         | 13.592.800         | 100        | 100%        | 16.970.600        | 100        |
| 7 | 01 | 05 |     |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  | <b>Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>140.224.900</b> | <b>140.224.900</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>86,189,700</b> | <b>100</b> |

|   |    |    |      |    |   |   |      |      |             |             |     |      |            |     |
|---|----|----|------|----|---|---|------|------|-------------|-------------|-----|------|------------|-----|
| 7 | 01 | 05 | 2021 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan</b>   | 100% | 100% | 140.224.900 | 140.224.900 | 100 | 100% | 86,189,700 | 100 |
| 7 | 01 | 05 | 2021 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan melalui Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya | 100% | 100% | 14.580.100  | 14.580.100  | 100 | 100% | 15.000.100 | 100 |
| 7 | 01 | 05 | 2021 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan   | Jumlah Pelaksanaan Bimtek, sosialisasi, Konsultasi  | 100% | 100% | 25.644.600  | 25.644.600  | 100 | 0%   | 0          | 0   |

|   |    |    |     |    |  |   |             |             |                   |                   |            |             |                   |            |
|---|----|----|-----|----|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|   |    |    |     |    | Ketahanan Nasional   | Penguatan Wawasan Kebangsaan  |             |             |                   |                   |            |             |                   |            |
| 7 | 01 | 05 | 201 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 100%        | 100%        | 100.000.200       | 100.000.200       | 100        | 100%        | 71,189,600        | 100        |
| 7 | 01 | 06 |     |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                | <b>prosentase Desa yang berkinerja baik</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>60.665.400</b> | <b>60.665.400</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>55,076,600</b> | <b>100</b> |
| 7 | 01 | 06 | 20  | 1  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>60.665.400</b> | <b>60.665.400</b> | <b>100</b> | <b>100%</b> | <b>55,076,600</b> | <b>100</b> |
| 7 | 01 | 06 | 201 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi   | 100%        | 100%        | 26.494.100        | 26.494.100        | 100        | 100%        | 15.001.700        | 100        |

|   |    |    |     |        |  |  |      |      |                |                |     |      |                |     |
|---|----|----|-----|--------|--|--|------|------|----------------|----------------|-----|------|----------------|-----|
|   |    |    |     |        |  | Administrasi<br>Tata<br>Pemerintah<br>n Desa   |      |      |                |                |     |      |                |     |
| 7 | 01 | 06 | 201 | 1<br>2 | Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas,<br>Fungsi, dan<br>Kewajiban Lembaga<br>Kemasyarakatan | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>Fasilitasi<br>Kegiatan<br>Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan Tingkat<br>Kecamat      | 100% | 100% | 25.124.00<br>0 | 25.124.00<br>0 | 100 | 100% | 25,074,8<br>00 | 100 |
| 7 | 01 | 06 | 201 | 1<br>3 | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Partisipatif                 | Jumlah<br>Dokumen<br>Fasilitasi<br>dalam<br>rangka<br>Perencanaa<br>n<br>Pembangun<br>an<br>Partisipatif | 100% | 100% | 9.047.300      | 9.047.300      | 100 | 100% | 15,000,1<br>00 | 100 |

Sumber : Renja Tahun 2022 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2022

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Caringin Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2,212,205,340,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.029.128.478,00 atau mencapai 46,52%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Caringin Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

**Tabel 2. 6**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

| Kode                | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Tahun 2023 TW II     |                    |              |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|--------------|
|                     |  | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)     | %            |
| <b>7.01.01</b>      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>              | <b>1.689.103.132</b> | <b>789.464.478</b> | <b>46,74</b> |
| <b>7.01.01.2.01</b> | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>14.909.600</b>    | <b>7.284.800</b>   | <b>48,86</b> |
| 7.01.01.2.01.01     | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 8.464.800            | 840.000            | 9,92         |
| 7.01.01.2.01.07     | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 6.444.800            | 6.444.800          | 100          |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>1.393.886.332</b> | <b>678.490.578</b> | <b>48,68</b> |
| 7.01.01.2.02.01     | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 1.387.125.432        | 678.490.578        | 48,91        |
| 7.01.01.2.02.05     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD         | 6.760.900            | 0                  | 0            |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Kegiatan Administrasi</b>   | <b>16.273.000</b>    | <b>6.273.000</b>   | <b>38,55</b> |

|                     |   |                    |                   |              |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|--------------|
|                     | <b>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                                       |                    |                   |              |
| 7.01.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                           | 6.273.000          | 6.273.000         | 100          |
| 7.01.01.2.05.09     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 10.000.000         | 0                 | 0            |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                            | <b>176.138.900</b> | <b>78.892.200</b> | <b>44,79</b> |
| 7.01.01.2.06.01     | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.665.200          | 5.079.000         | 58,61        |
| 7.01.01.2.06.02     | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 50.650.200         | 27.861.300        | 55,01        |
| 7.01.01.2.06.03     | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 7.094.900          | 4.638.300         | 65,38        |
| 7.01.01.2.06.05     | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 6.003.600          | 3.117.600         | 51,93        |
| 7.01.01.2.06.06     | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 3.254.400          | 1.356.000         | 41,67        |
| 7.01.01.2.06.08     | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 47.300.000         | 18.920.000        | 40           |
| 7.01.01.2.06.09     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 35.660.000         | 17.920.000        | 50,25        |
| 7.01.01.2.06.10     | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | 17.510.600         | 0                 | 0            |

|                     |  |                    |                   |              |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>30.050.300</b>  | <b>13.270.100</b> | <b>44,16</b> |
| 7.01.01.2.08.02     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 9.000.000          | 4.500.000         | 50           |
| 7.01.01.2.08.03     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 5.390.000          | 2.550.000         | 47,31        |
| 7.01.01.2.08.04     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 15.660.300         | 6.220.100         | 39,72        |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>57.845.000</b>  | <b>5.253.800</b>  | <b>9,08</b>  |
| 7.01.01.2.09.01     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 8.834.200          | 5.253.800         | 59,47        |
| 7.01.01.2.09.09     | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 49.010.800         | 0                 | 0            |
| <b>7.01.02</b>      | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>   | <b>104.751.400</b> | <b>18.801.800</b> | <b>17,95</b> |
| <b>7.01.02.2.01</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>94.751.400</b>  | <b>13.350.500</b> | <b>14,09</b> |
| 7.01.02.2.01.02     | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 94.751.400         | 13.350.500        | 14,09        |
| <b>7.01.02.2.02</b> | <b>Kegiatan</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>5.451.300</b>  | <b>54,51</b> |

|                     |   |                    |                    |              |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|                     | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> |                    |                    |              |
| 7.01.02.2.02.01     | Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | 10.000.000         | 5.451.300          | 54,51        |
| <b>7.01.03</b>      | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>   | <b>48.211.700</b>  | <b>23.515.100</b>  | <b>48,77</b> |
| <b>7.01.03.2.01</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   | <b>17.011.700</b>  | <b>10.515.100</b>  | <b>61,81</b> |
| 7.01.03.2.01.01     | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                    | 7.011.500          | 7.011.500          | 100          |
| 7.01.03.2.01.03     | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                | 10.000.200         | 3.503.600          | 35,04        |
| <b>7.01.03.2.05</b> | <b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>                            | <b>31.200.000</b>  | <b>13.000.000</b>  | <b>41,67</b> |
| 7.01.03.2.05.02     | Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  | 31.200.000         | 13.000.000         | 41,67        |
| <b>7.01.04</b>      | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>   | <b>252.531.700</b> | <b>138.568.400</b> | <b>54,87</b> |
| <b>7.01.04.2.01</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan</b>   | <b>235.561.100</b> | <b>130.411.200</b> | <b>55,36</b> |

|                     |   |                   |                   |              |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|                     | <b>Ketertiban Umum</b>  |                   |                   |              |
| 7.01.04.2.01.01     | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | 186.980.000       | 93.000.000        | 49,74        |
| 7.01.04.2.01.02     | Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 48.581.100        | 37.411.200        | 77,01        |
| <b>7.01.04.2.02</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   | <b>16.970.600</b> | <b>8.157.200</b>  | <b>48,07</b> |
| 7.01.04.2.02.01     | Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 16.970.600        | 8.157.200         | 48,07        |
| <b>7.01.05</b>      | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | <b>86.189.700</b> | <b>24.590.700</b> | <b>28,53</b> |
| <b>7.01.05.2.01</b> | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   | <b>86.189.700</b> | <b>24.590.700</b> | <b>28,53</b> |
| 7.01.05.2.01.01     | Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia       | 15.000.100        | 0                 | 0            |

|                     |  |                   |                   |              |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|                     | Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |                   |              |
| 7.01.05.2.01.08     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 71.189.600        | 24.590.700        | 34,54        |
| <b>7.01.06</b>      | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | <b>55.076.600</b> | <b>34.188.000</b> | <b>62,07</b> |
| <b>7.01.06.2.01</b> | <b>Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                             | <b>55.076.600</b> | <b>34.188.000</b> | <b>62,07</b> |
| 7.01.06.2.01.02     | Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 15.001.700        | 10.240.100        | 68,26        |
| 7.01.06.2.01.12     | Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                       | 25.074.800        | 8.947.800         | 35,68        |
| 7.01.06.2.01.13     | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif   | 15.000.100        | 15.000.100        | 100          |

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat sub kegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan aktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Caringin adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Caringin Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran

|   |    |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 42 |
|---|----|

pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Caringin Pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Caringin Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

- 1) Adanya mutasi pegawai sehingga anggaran untuk pemberian gaji/belanja pegawai tidak terserap seluruhnya.
- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 3) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- 4) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Caringin selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

|  |    |
|--|----|
|  |    |
|  |    |
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 43 |







|  |  |  |  |  |             |  |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-------------------|
|  |  | Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  |  |             |  |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                   |
|  |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |  |  | 110,000,000 |  | 100.000.200 |  | 24.590.700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.590.700 |  |  |  |  | Kasi Kesra        |
|  |  | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  |  |  |             |  |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                   |
|  |  | <b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  |  |  |             |  |             |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |                   |
|  |  | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |  |  | 29,108,303  |  | 26.494.100  |  | 10.240.100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.240.100 |  |  |  |  | Kasi Pemerintahan |



|   |   |  |  |  |            |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |
|---|---|--|--|--|------------|-----------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|
|   |   | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |  |  |            |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |
|   |   | <b>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b> |  |  |            |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |
|   |   | Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                 |  |  | 55,000,000 | 0         |  |  | 13,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000,000 | Kasi Kesra    |
| 4 | <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |  |  |            |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |
|   |   | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  |  |            |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |
|   |   | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |  |  | 22,000,000 | 7.483.300 |  |  | 840.000    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840.000    | Kasubbag Umum |
|   |   | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  | 19,844,111 | 4.362.950 |  |  | 6.444.800  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.444.800  | Kasubbag Umum |
|   |   | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |  |            |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |               |





|  |  |  |  |  |             |            |            |  |  |  |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |               |               |
|--|--|--|--|--|-------------|------------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
|  |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    |  |  | 165,000,000 | 49.920.000 | 17.920.000 |  |  |  | 17.920.000 |  |  |  |  | 17.920.000 |  |  |  |  | Kasubbag Umum |               |
|  |  | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                   |  |  | 30,000,000  | 0          | 0          |  |  |  | 0          |  |  |  |  | 0          |  |  |  |  |               | Kasubbag Umum |
|  |  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |  |  |             |            |            |  |  |  |            |  |  |  |  |            |  |  |  |  |               |               |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  | 18,000,000  | 7.800.000  | 4.500.000  |  |  |  | 4.500.000  |  |  |  |  | 4.500.000  |  |  |  |  |               | Kasubbag Umum |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       |  |  | 12,567,500  | 3.570.000  | 2.550.000  |  |  |  | 2.550.000  |  |  |  |  | 2.550.000  |  |  |  |  |               | Kasubbag Umum |
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |  |  | 30,406,046  | 12.440.200 | 6.220.100  |  |  |  | 6.220.100  |  |  |  |  | 6.220.100  |  |  |  |  |               | Kasubbag Umum |

| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  |            |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  | 8,316,220  |  | 7.560.200  |  | 5.253.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kasubbag Umum |
|  |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  | 49,996,809 |  | 43.889.750 |  | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kasubbag Umum |
| Rata-rata capaian kinerja (%)  |  |  |  |  |            |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Predikat Kinerja   |  |  |  |  |            |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Faktor pendorong pencapaian kinerja :  |  |  |  |  |            |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Faktor penghambat  |  |  |  |  |            |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya    |  |  |  |  |            |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
| Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya  |  |  |  |  |            |  |            |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2023

### 2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (Stunting)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

(Silakan untuk di sesuaikan urusan SPM Bagi SKPD yang mendukung SPM)

**Tabel 2.8**  
**Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023**

| No                       | SPM                   |  | TPB  |  | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD             | Program                        |
|--------------------------|-----------------------|--|--|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|                          | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian   | Tujuan   | Target   |                         |                  |                  |                                |
| <b>1. SPM PENDIDIKAN</b> |                       |  |  |  |                         |                  |                  |                                |
| 1                        | Pendidikan Dasar      | Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | 100 %                   | 97,43%           | Dinas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan |

| No | SPM                       |  | TPB  |  | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD             | Program  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------|--|
|    | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator Pencapaian   | Tujuan   | Target   |  |                            |                  |  |
| 2  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.                         | 100 %  | 92,37%                     | Dinas Pendidikan | 1. Program Pengelolaan Pendidikan<br>2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan |
| 3  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD   | 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | 100 %  | 94,99%                     | Dinas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan   |

| No                      | SPM                                 |  | TPB  |   | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD            | Program   |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------|---|
|                         | Jenis Pelayanan Dasar               | Indikator Pencapaian                                   | Tujuan   | Target  |  |                            |                 |   |
| <b>2. SPM KESEHATAN</b> |                                     |  |  |   |  |                            |                 |   |
| 1                       | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil       | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan    | Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.                                     | 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro | 100 %  | 95,49%                     | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 2                       | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin    | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup   | 100 %  | 94,42%                     | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 3                       | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang                            | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan  | 3.2. Pada tahun 2030,   | 100 %  | 98,89%                     | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya   |

| No | SPM  |  | TPB   |  | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD            | Program   |
|----|--|--|---|--|--|----------------------------|-----------------|---|
|    | Jenis Pelayanan Dasar                          | Indikator Pencapaian   | Tujuan  | Target   |  |                            |                 |   |
|    | Lahir  | mendapatkan layanan kesehatan  | n yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                           | mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.                       |  |                            |                 | Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat                         |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                     | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                             | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 100 %  | 91,11%                     | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk            | 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap   | 100 %  | 96,21%                     | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

| No | SPM   |  | TPB  |  | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD               | Program  |
|----|---|--|--|--|--|----------------------------|--------------------|--|
|    | Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar                       | Indikator<br>Pencapai<br>an  | Tujuan   | Target   |  |                            |                    |  |
|    |   |  | Semua<br>Usia  | pelayanan<br>kesehatan<br>dasar yang<br>baik, dan<br>akses<br>terhadap<br>obat<br>obatan<br>dan vaksin<br>dasar yang<br>aman,<br>efektif,<br>berkualita<br>s, dan<br>terjangkau<br>bagi<br>semua<br>orang.   |  |                            |                    |  |
| 6  | Pelayanan<br>kesehatan<br>pada usia<br>produktif, | Jumlah<br>Warga<br>Negara<br>usia<br>produktif<br>yang<br>mendapatk<br>an layanan<br>kesehatan | Tujuan 3<br>Menjamin<br>Kehidupa<br>n yang<br>Sehat dan<br>Meningka<br>tkan<br>Kesejahter<br>aan<br>Seluruh<br>Penduduk<br>Semua<br>Usia |  | 100<br>%                                     | 98,9<br>1%                 | Dinas<br>Kesehatan | Program<br>Pemenuhan<br>Upaya<br>Kesehatan<br>Perorangan<br>dan Upaya<br>Kesehatan<br>Masyarakat |
| 7  | Pelayanan<br>kesehatan<br>pada usia<br>lanjut;    | Jumlah<br>warga<br>negara<br>usia lanjut<br>yang<br>mendapatk<br>an layanan<br>kesehatan       | Tujuan 1.<br>Mengakhi<br>ri<br>kemiskin<br>an dalam<br>segala<br>bentuk di<br>manapun<br>.   | 1.3.<br>Menerapka<br>n secara<br>nasional<br>sistem dan<br>upaya<br>perlindung<br>an sosial<br>yang tepat<br>bagi<br>semua,<br>termasuk<br>kelompok<br>yang<br>paling<br>miskin,<br>dan pada<br>tahun<br>2030<br>mencapai<br>cakupan<br>substansia<br>l bagi<br>kelompok<br>miskin<br>dan<br>rentan. | 100<br>%                                     | 90,3<br>0%                 | Dinas<br>Kesehatan | Program<br>Pemenuhan<br>Upaya<br>Kesehatan<br>Perorangan<br>dan Upaya<br>Kesehatan<br>Masyarakat |
| 8  | Pelayanan<br>kesehatan<br>penderita<br>hipertensi | Jumlah<br>Warga<br>Negara<br>penderita<br>hipertensi<br>yang                                   | Tujuan 3.<br>Menjamin<br>Kehidupa<br>n yang<br>Sehat dan<br>Meningka   |  | 100<br>%                                     | 95,3<br>4%                 | Dinas<br>Kesehatan | Program<br>Pemenuhan<br>Upaya<br>Kesehatan<br>Perorangan<br>dan Upaya                            |

| No | SPM  |   | TPB  |   | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD            | Program   |
|----|--|---|--|---|-------------------------|------------------|-----------------|---|
|    | Jenis Pelayanan Dasar                                | Indikator Pencapaian  | Tujuan   | Target  |                         |                  |                 |   |
|    |  | mendapatkan layanan kesehatan   | tkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia   |   |                         |                  |                 | Kesehatan Masyarakat  |
| 9  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus       | Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.3. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 100 %                   | 90,46%           | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan                   | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.3. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 100 %                   | 85,73%           | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis       | Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan                          | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan  | 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis   | 100 %                   | 99,65%           | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan            |

| No                           | SPM   |  | TPB   |   | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD                                    | Program   |
|------------------------------|---|--|---|---|--|----------------------------|---|---|
|                              | Jenis Pelayanan Dasar   | Indikator Pencapaian   | Tujuan  | Target  |  |                            |   |   |
|                              |   | an layanan kesehatan   | Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia   | is, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.  |  |                            |   | Masyarakat  |
| 1<br>2                       | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                 | 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 100 %  | 99,69%                     | Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet         | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| <b>3. SPM PEKERJAAN UMUM</b> |   |  |   |   |  |                            |   |   |
| 1                            | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | 6.1.1* Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.  | 100 %  | 87,02%                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            |
| 2                            | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah  | 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan   | 6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang   | 100 %  | 72,06%                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                      |

| No                             | SPM  |  | TPB  |   | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD   | Program  |
|--------------------------------|--|--|--|---|--|----------------------------|--|--|
|                                | Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar  | Indikator<br>Pencapai<br>an  | Tujuan   | Target  |  |                            |  |  |
|                                |  | domestik   | n yang<br>me madai<br>dan<br>merata<br>bagi<br>semua,<br>dan<br>menghent<br>ikan<br>praktik<br>buang air<br>besar di<br>tempat<br>terbuka,<br>memberik<br>an<br>perhatian<br>khusus<br>pada<br>kebutuha<br>n kaum<br>perem<br>puan,<br>serta<br>kelompok<br>masyarak<br>at rentan. | dikelola<br>secara<br>aman,<br>termasuk<br>fasilitas<br>cuci<br>tangan<br>dengan air<br>dan<br>sabun.<br><br>6.3.1.<br>Proporsi<br>limbah<br>cair yang<br>diolah<br>secara<br>aman.   |  |                            |  |  |
| <b>4. SPM PERUMAHAN RAKYAT</b> |  |  |  |   |  |                            |  |  |
| 1                              | Penyediaan<br>dan<br>rehabilitasi<br>rumah<br>yang Layak<br>huni bagi<br>korban<br>bencana<br>Kab/kota | Jumlah<br>Warga<br>Negara<br>korban<br>bencana<br>yang<br>memperole<br>h rumah<br>layak huni | 11.<br>Menjadi<br>kan kota<br>dan<br>pemukim<br>an<br>inklusif,<br>aman,<br>tangguh,<br>dan<br>berkelanj<br>utan.  | 11.5. Pada<br>tahun<br>2030,<br>membang<br>un<br>ketahanan<br>masyaraka<br>t miskin<br>dan<br>mereka<br>yang<br>berada<br>dalam<br>kondisi<br>rentan,<br>dan<br>menguran<br>gi<br>kerentana<br>n mereka<br>terhadap<br>kejadian<br>ekstrim<br>terkait<br>iklim dan<br>guncangan<br>ekonomi,<br>sosial,<br>lingkunga<br>n, dan<br>bencana. | 100<br>%                                     | 100<br>%                   | Dinas<br>Perumaha<br>n dan<br>Permukim<br>an | Program<br>Pengembang<br>an Perumahan<br>Kegiatan<br>Rehabilitasi<br>Rumah bagi<br>Krbn<br>Bencana |
| 2                              | Fasilitasi<br>penyediaan<br>rumah<br>yang layak  | Jumlah<br>Warga<br>Negara<br>yang  | 11.<br>Menjadi<br>kan kota<br>dan  | 11.1. Pada<br>tahun<br>2030,<br>menjamin  | 100<br>%                                     | 100<br>%                   | Dinas<br>Perumaha<br>n dan<br>Permukim       | Program<br>Pengembang<br>an Perumahan  |

| No                            | SPM   |   | TPB   |  | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD                                | Program  |
|-------------------------------|---|---|---|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--|
|                               | Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar   | Indikator<br>Pencapai<br>an   | Tujuan  | Target   |  |                            |                                     |  |
|                               | huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota | terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.   | akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.   |  |                            | an                                  |  |
| <b>5. SPM TRANTIBUMLINMAS</b> |   |   |   |  |  |                            |                                     |  |
| 1                             | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara                                     | 16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | 16.3. Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.<br><br>16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 100 %  | 100 %                      | Satuan Polisi Pamong Praja          | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| 2                             | Pelayanan informasi rawan bencana   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana   | 16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan  |  | 100 %  | 82,99 %                    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Program Penanggulangan Bencana                       |

| No | SPM   |   | TPB  |        | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD                                | Program                        |
|----|---|---|--|--------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|    | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Indikator Pencapaian  | Tujuan   | Target |                         |                  |                                     |                                |
|    |   |   | Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan   |        |                         |                  |                                     |                                |
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 16.Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan |        | 100 %                   | 41,99%           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Program Penanggulangan Bencana |
| 4  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 16.Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun  |        | 100 %                   | 100 %            | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Program Penanggulangan Bencana |

| No                   | SPM   |   | TPB  |  | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD                              | Program   |
|----------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
|                      | Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar   | Indikator<br>Pencapai<br>an   | Tujuan   | Target   |  |                            |                                   |   |
|                      |   |   | un<br>Kelembag<br>aan yang<br>Efektif,<br>Akuntabe<br>l, dan<br>Inklusif di<br>Semua<br>Tingkatan  |  |  |                            |                                   |   |
| 5                    | Pelayanan<br>Penyelamat<br>an dan<br>evakuasi<br>korban<br>kebakaran                      | Jumlah<br>Warga<br>Negara<br>yang<br>memperole<br>h layanan<br>penyelamat<br>an dan<br>Evakuasi<br>korban<br>kebakaran  | 16.Mengu<br>atkan<br>Masyarak<br>at yang<br>Inklusif<br>dan<br>Damai<br>untuk<br>Pembang<br>unan<br>Berkelanj<br>utan,<br>Menyedia<br>kan<br>Akses<br>Keadilan<br>untuk<br>Semua,<br>dan<br>Membang<br>un<br>Kelembag<br>aan yang<br>Efektif,<br>Akuntabe<br>l, dan<br>Inklusif di<br>Semua<br>Tingkatan |  | 100<br>%                                     | 100<br>%                   | Dinas<br>Pemadam<br>Kebakara<br>n | Program<br>Pencegahan,<br>Penanggulang<br>an,<br>Penyelamatan<br>Kebakaran<br>dan<br>Penyelamatan<br>Non<br>Kebakaran |
| <b>6. SPM SOSIAL</b> |   |   |  |  |  |                            |                                   |   |
| 1                    | Rehabilitasi<br>sosial<br>dasar<br>penyandang<br>disabilitas<br>telantar di<br>luar panti | Jumlah<br>Warga<br>Negara<br>penyandang<br>disabilitas<br>yang<br>memperole<br>h rehabilitasi<br>sosial diluar<br>panti | 1.<br>Mengakhi<br>ri<br>kemiskin<br>an dalam<br>segala<br>bentuk di<br>manapun<br>.  | 1.3.<br>Menerapka<br>n secara<br>nasional<br>sistem dan<br>upaya<br>perlindung<br>an sosial<br>yang tepat<br>bagi<br>semua,<br>termasuk<br>kelompok<br>yang<br>paling<br>miskin,<br>dan pada<br>tahun<br>2030<br>mencapai<br>cakupan<br>substansia<br>l bagi | 100<br>%                                     | 100<br>%                   | Dinas<br>Sosial                   | Program<br>Rehabilitasi<br>Sosial   |

| No | SPM  |  | TPB  |   | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD         | Program                                 |
|----|--|--|--|---|--|----------------------------|--------------|---|
|    | Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar                                  | Indikator<br>Pencapai<br>an  | Tujuan   | Target  |  |                            |              |   |
|    |  |  |  | kelompok<br>miskin<br>dan<br>rentan.  |  |                            |              |   |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti       | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi   | 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. | 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 100 %  | 100 %                      | Dinas Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. | 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 100 %  | 100 %                      | Dinas Sosial | Program Pemberdayaan Sosial             |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan  | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis  | 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala                    | 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya  | 100 %  | 100 %                      | Dinas Sosial | Program Rehabilitasi Sosial             |

| No | SPM  |   | TPB   |  | Targ<br>et<br>Capa<br>ian<br>SPM<br>202<br>2 | Capa<br>ian<br>SPM<br>2022 | SKPD            | Program  |
|----|--|---|---|--|--|----------------------------|-----------------|--|
|    | Jenis<br>Pelayanan<br>Dasar  | Indikator<br>Pencapai<br>an   | Tujuan  | Target   |  |                            |                 |  |
|    | n dan<br>pengemis<br>di luar<br>panti  | yang<br>memperole<br>h<br>rehabilitasi<br>sosial<br>dasar tuna<br>sosial<br>diluar<br>panti                                       | bentuk di<br>manapun<br>.   | perlindung<br>an sosial<br>yang tepat<br>bagi<br>semua,<br>termasuk<br>kelompok<br>yang<br>paling<br>miskin,<br>dan pada<br>tahun<br>2030<br>mencapai<br>cakupan<br>substansia<br>l bagi<br>kelompok<br>miskin<br>dan<br>rentan.   |  |                            |                 |  |
| 5  | Perlindung<br>an dan<br>jaminan<br>sosial pada<br>saat<br>tanggap &<br>paska<br>bencana<br>bagi<br>korban<br>bencana<br>kab/kota | Jumlah<br>Warga<br>Negara<br>korban<br>bencana<br>kab/kota<br>yang<br>memperole<br>h<br>perlindung<br>an dan<br>jaminan<br>sosial | 1.<br>Mengakhi<br>ri<br>kemiskin<br>an dalam<br>segala<br>bentuk di<br>manapun<br>. | 1.5. Pada<br>tahun<br>2030,<br>membang<br>un<br>ketahanan<br>masyaraka<br>t miskin<br>dan<br>mereka<br>yang<br>berada<br>dalam<br>kondisi<br>rentan,<br>dan<br>menguran<br>gi<br>kerentana<br>n mereka<br>terhadap<br>kejadian<br>ekstrim<br>terkait<br>iklim dan<br>guncangan<br>ekonomi,<br>sosial,<br>lingkunga<br>n, dan<br>bencana. | 100<br>%                                     | 100<br>%                   | Dinas<br>Sosial | Program<br>Perlindungan<br>dan Jaminan<br>Sosial |

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capain SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Sesuaiakan dengan capaian urusan SPM SKPD). Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak

terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh.

|   |    |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 67 |
|---|----|

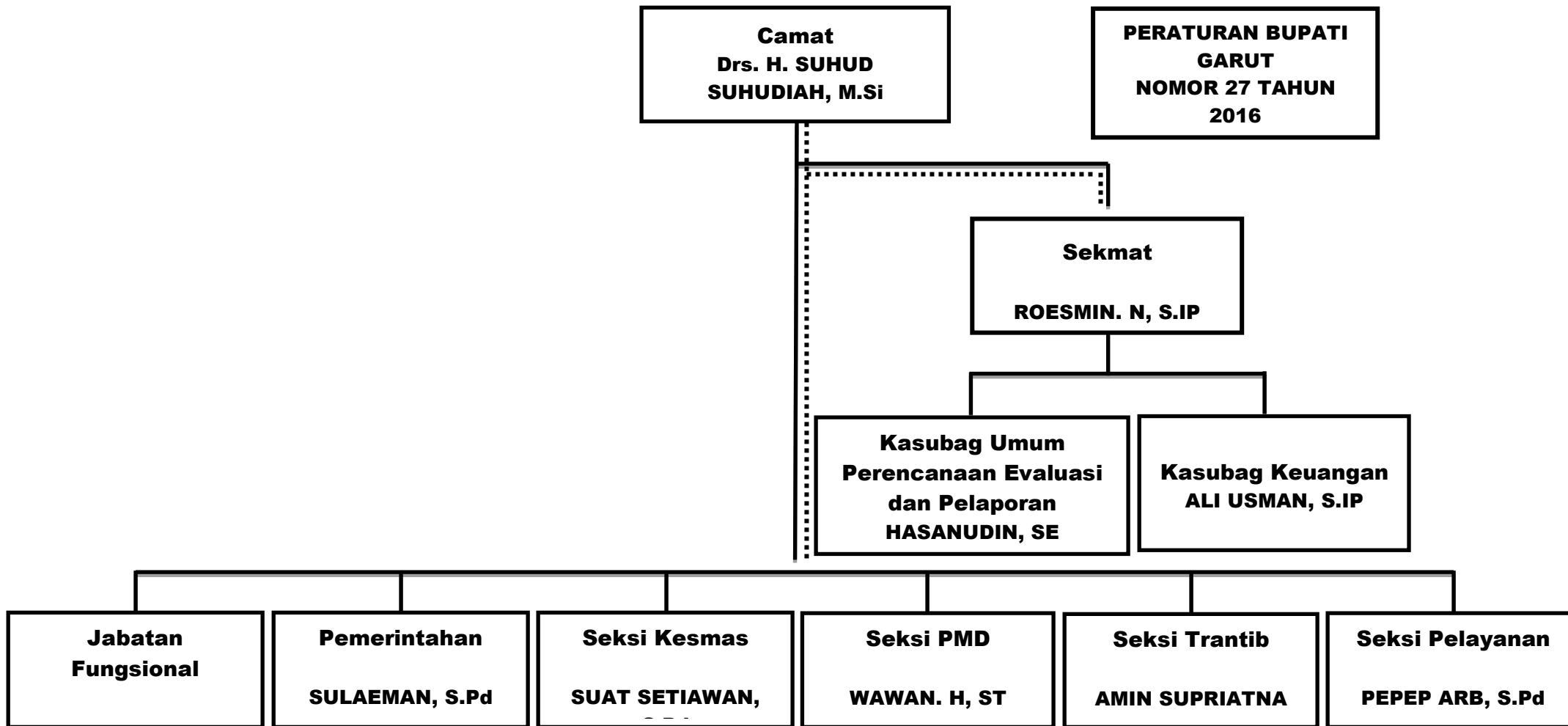
### **2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Caringin sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Caringin Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Caringin berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 68 |

**Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Caringin**



Sumber: Perbup Nomor 235 Tahun 2021

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 70 |

**Tabel 2. 9****Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Caringin Kabupaten Garut**

| NO   | Indikator  | SPM/<br>standar<br>nasional | IKK | Target Renstra SKPD |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis |
|--|--|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|  |  |                             |     | Tahun<br>2021       | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 | Tahun<br>2021     | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2024 |                     |
| (1)  | (2)  | (3)                         | (4) | (5)                 | (6)           | (7)           | (8)           | (9)               | (10)          | (11)          | (12)          | (13)                |
| 1  | Nilai SKM  |                             |     | 82                  | 82,50         | 82,75         | 83            | 82                | 82,50         | 82,75         |               |                     |
| 2  | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan               |                             |     | 65                  | 70            | 75            | 80            | 65                | 70            | 75            |               |                     |
| 3  | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan |                             |     | 80                  | 85            | 90            | 95            | 80                | 85            | 90            |               |                     |
| 4  | Nilai SAKIP Kecamatan                            |                             |     | C                   | C             | CC            | CC            | C                 | C             | CC            |               |                     |
| <i>Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Caringin, 2023</i> |  |                             |     |                     |               |               |               |                   |               |               |               |                     |

## **2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Caringin bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- Program RKPD/Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD/Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi jawa barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;

|  |    |
|--|----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 72 |
|--|----|

- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

## 2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Caringin disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Caringin serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 73 |
|--|----|

direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 32 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,212,205,340,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,212,205,340,00. dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 3,215,814,138,-, mengalami penyesuaian sebesar Rp. 879.154.780,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 2,336,659,358,-, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 124.454.018,-, menjadi sebesar Rp. 2,212,205,340,-, dari anggaran pada APBD Tahun 2023.

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 74 |
|--|----|

5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</i> | 75 |

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2023

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |         |                |               |                     |                                 | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                    |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |               |                    |        |
|------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------|
|      |  |   |                            |                                   |  | Target 2023                            |         | Pagu Indikatif |               |                     | Lokasi                          |                                      | Sumber Dana  | Prioritas          |                                   | Target        | Pagu Indikatif     |        |
|      |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi | RKPD 2023      | APBD 2023     | RKPD 2023 Perubahan |                                 |                                      |  | Nasional           |                                   |               |                    | Daerah |
| 7    |  |   |                            |                                   |  | UNSUR KEWILAYAHAN                      |         |                |               |                     |                                 |                                      |  |                    |                                   |               |                    |        |
| 7    | 01   |   |                            |                                   |  |  |         | 3,215,814,138  | 2,336,659,358 | 2,212,205,340       |                                 |                                      |  | 3,552,959,460      |                                   |               |                    |        |
| 7    | 01   | 01  |                            |                                   |  |  |         | 2,326,589,856  | 1,735,811,358 | 1,680,192,840       |                                 |                                      | 100 %  | 2,580,185,838      |                                   |               |                    |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       |                                   |  |  |         | 43,298,780     | 19,659,400    | 15,887,000          |                                 |                                      | 100 %  | 41,844,111         |                                   |               |                    |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 01                                |  |  |         | 24,934,780     | 11,921,600    | 9,442,200           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 6 Dokumen                         | 22,000,000    | Kecamatan Caringin |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.01                       | 07                                |  |  |         | 18,364,000     | 7,737,800     | 6,444,800           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Laporan                         | 19,844,111    | Kecamatan Caringin |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.02                       |                                   |  |  |         | 1,658,134,636  | 1,412,124,758 | 1,371,456,640       |                                 |                                      | 100 %  | 1,773,195,138      |                                   |               |                    |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.02                       | 01                                |  |  |         | 1,640,465,436  | 1,404,014,358 | 1,363,466,740       | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 10 Orang/bulan                    | 1,753,695,138 | Kecamatan Caringin |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.02                       | 05                                |  |  |         | 17,669,200     | 8,110,400     | 7,989,900           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Laporan                         | 19,500,000    | Kecamatan Caringin |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.05                       |                                   |  |  |         | 29,685,000     | 16,273,000    | 6,273,000           |                                 |                                      | 100 %  | 37,651,250         |                                   |               |                    |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.05                       | 02                                |  |  |         | 9,685,000      | 6,273,000     | 6,273,000           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 20 Paket                          | 11,000,000    | Kecamatan Caringin |        |
| 7    | 01   | 01  | 2.05                       | 09                                |  |  |         | 20,000,000     | 10,000,000    |                     | Kab. Garut, Caringin,           | Dana Transfer Umum-                  | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 2 Orang                           | 26,651,250    | Kecamatan Caringin |        |

| Kode            | Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan           | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |            |                |             |                     |  | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                |                    |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|------------|----------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2023                            |            | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                                       |                                      | Sumber Dana                       | Prioritas  |                                   | Target     | Pagu Indikatif |                    |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi    | RKPD 2023      | APBD 2023   | RKPD 2023 Perubahan |  |                                      |                                   | Nasional   |                                   |            |                | Daerah             |
|                 |  | Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   |                            |                                   |  |  |            |                |             |                     | Purbayani                                    | Dana Alokasi Umum                    |                                   |  |                                   |            |                |                    |
| 7 01 01 2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | %                          | %                                 | %  | 100 %                                  | 100 %      | 366,749,590    | 199,858,900 | 198,680,900         |  |                                      |                                   | 100 %  | 517,468,384                       |            |                |                    |
| 7 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 15,512,400     | 8,665,200   | 8,665,200           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 1 Paket    | 18,762,000     | Kecamatan Caringin |
| 7 01 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 115,782,200    | 50,650,200  | 73,192,200          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 1 Paket    | 175,000,000    | Kecamatan Caringin |
| 7 01 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                            |                                   |  | 1 Paket                                | 1 Paket    | 15,718,600     | 7,094,900   | 7,094,900           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 1 Paket    | 19,648,000     | Kecamatan Caringin |
| 7 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |  | 5 Paket                                | 5 Paket    | 16,257,900     | 6,003,600   | 6,003,600           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 5 Paket    | 17,751,784     | Kecamatan Caringin |
| 7 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan       |                            |                                   |  | 48 Dokumen                             | 48 Dokumen | 3,254,400      | 3,254,400   | 3,254,400           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 48 Dokumen | 11,446,600     | Kecamatan Caringin |
| 7 01 01 2.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 72,685,000     | 56,760,000  | 47,300,000          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 12 Laporan | 79,860,000     | Kecamatan Caringin |
| 7 01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |  | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 99,720,000     | 49,920,000  | 35,660,000          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 12 Laporan | 165,000,000    | Kecamatan Caringin |
| 7 01 01 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD                               |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen  | 27,819,090     | 17,510,600  | 17,510,600          | Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin                | 1 Dokumen  | 30,000,000     | Kecamatan Caringin |

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |            |                     |                                 | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                    |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |            |                    |        |
|-----------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--------|
|                 |   |  |                            |                                   |  | Target 2023                            |           | Pagu Indikatif |            |                     | Lokasi                          |                                      | Sumber Dana  | Prioritas          |                                   | Target     | Pagu Indikatif     |        |
|                 |   |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2023      | APBD 2023  | RKPD 2023 Perubahan |                                 |                                      |  | Nasional           |                                   |            |                    | Daerah |
| 7 01 01 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 117,672,700    | 0          | 0                   |                                 |                                      |  | 100 %              | 90,740,380                        |            |                    |        |
| 7 01 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    |                            |                                   |  | 3 Unit                                 | 3 Unit    | 117,672,700    | 0          | 0                   | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 3 Unit                            | 90,740,380 | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 49,975,951     | 30,050,300 | 30,050,300          |                                 |                                      |  | 100 %              | 60,973,546                        |            |                    |        |
| 7 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 15,000,000     | 9,000,000  | 9,000,000           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Laporan                         | 18,000,000 | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 01 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 11,425,000     | 5,390,000  | 5,390,000           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Laporan                         | 12,567,500 | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 23,550,951     | 15,660,300 | 15,660,300          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Laporan                         | 30,406,046 | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 61,073,199     | 57,845,000 | 57,845,000          |                                 |                                      |  | 100 %              | 58,313,029                        |            |                    |        |
| 7 01 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |  | 10 Unit                                | 10 Unit   | 11,950,500     | 8,834,200  | 8,834,200           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 10 Unit                           | 8,316,220  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |  | 2 gedung                               | 2 gedung  | 49,122,699     | 49,010,800 | 49,010,800          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 2 gedung                          | 49,996,809 | Kecamatan Caringin |        |

| Kode            | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |                                 | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                    |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                    |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2023                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                          |                              | Sumber Dana  | Prioritas          |                                   | Target      | Pagu Indikatif     |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2023      | APBD 2023   | RKPD 2023 Perubahan |                                 |                              |  | Nasional           |                                   |             |                    | Daerah |
| 7 01 02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 220,565,288    | 120,419,400 | 104,751,400         |                                 |                              |  |                    | 100 %                             | 237,582,614 |                    |        |
| 7 01 02 2.01    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan                                | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 192,320,800    | 110,419,400 | 94,751,400          |                                 |                              |  |                    | 100 %                             | 210,813,678 |                    |        |
| 7 01 02 2.01 02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                |                            |                                   |  | 4 Dokumen                              | 4 Dokumen | 192,320,800    | 110,419,400 | 94,751,400          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 4 Dokumen                         | 210,813,678 | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 02 2.02    | Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan PATEN   | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 28,244,488     | 10,000,000  | 10,000,000          |                                 |                              |  |                    | 100 %                             | 26,768,936  |                    |        |
| 7 01 02 2.02 01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                     |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 28,244,488     | 10,000,000  | 10,000,000          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 2 Dokumen                         | 26,768,936  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 03         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 116,147,600    | 48,351,700  | 32,611,700          |                                 |                              |  |                    | 100 %                             | 122,975,005 |                    |        |
| 7 01 03 2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa   | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 65,534,500     | 17,151,700  | 17,011,700          |                                 |                              |  |                    | 100 %                             | 67,975,005  |                    |        |
| 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa         |                            |                                   |  | 8 Lembaga                              | 8 Lembaga | 28,648,500     | 7,151,500   | 7,011,500           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 8 Lembaga                         | 29,000,000  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 03 2.01 03 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                     |                            |                                   |  | 6 Laporan                              | 6 Laporan | 36,886,000     | 10,000,200  | 10,000,200          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 6 Laporan                         | 38,975,005  | Kecamatan Caringin |        |

| Kode            | Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |   | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                    |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                    |        |
|-----------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|                 |  |   |                            |                                   |  | Target 2023                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi  |  | Sumber Dana  | Prioritas          |                                   | Target      | Pagu Indikatif     |        |
|                 |  |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2023      | APBD 2023   | RKPD 2023 Perubahan |   |  |  | Nasional           |                                   |             |                    | Daerah |
| 7 01 03 2.05    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  | Jumlah Laporan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 50,613,100     | 31,200,000  | 15,600,000          |   |  |  | 100 %              | 55,000,000                        |             |                    |        |
| 7 01 03 2.05 02 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 50,613,100     | 31,200,000  | 15,600,000          | Kab. Garut<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Dokumen                         | 55,000,000  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 04         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Persentasi penangan gangguan Trantibum  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 287,834,700    | 262,000,200 | 253,383,100         |   |  |  | 100 %              | 323,332,700                       |             |                    |        |
| 7 01 04 2.01    | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah laporan penanganan Gangguan Trantibum  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 238,640,400    | 238,800,100 | 236,412,500         |   |  |  | 100 %              | 262,695,200                       |             |                    |        |
| 7 01 04 2.01 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                |                            |                                   |  | 2 Laporan                              | 2 Laporan | 188,800,000    | 188,800,000 | 187,831,400         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 2 Laporan                         | 207,695,200 | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 04 2.01 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   |                            |                                   |  | 1 Laporan                              | 1 Laporan | 49,840,400     | 50,000,100  | 48,581,100          | Kab. Garut<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Laporan                         | 55,000,000  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 04 2.02    | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah Laporan Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan   | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 49,194,300     | 23,200,100  | 16,970,600          |   |  |  | 100 %              | 60,637,500                        |             |                    |        |
| 7 01 04 2.02 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |  | 3 Laporan                              | 3 Laporan | 49,194,300     | 23,200,100  | 16,970,600          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 3 Laporan                         | 60,637,500  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 05         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada   | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 161,250,000    | 115,000,100 | 86,189,700          |   |  |  | 100 %              | 173,275,000                       |             |                    |        |

| Kode            | Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                |             |                     |                                 | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                    |                    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |                    |        |
|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------|
|                 |   |   |                            |                                   |  | Target 2023                            |           | Pagu Indikatif |             |                     | Lokasi                          |                                      | Sumber Dana  | Prioritas          |                                   | Target      | Pagu Indikatif     |        |
|                 |   |   |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2023      | APBD 2023   | RKPD 2023 Perubahan |                                 |                                      |  | Nasional           |                                   |             |                    | Daerah |
|                 |   | Camat   |                            |                                   |  |  |           |                |             |                     |                                 |                                      |  |                    |                                   |             |                    |        |
| 7 01 05 2.01    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 161,250,000    | 115,000,100 | 86,189,700          |                                 |                                      |  | 100 %              | 173,275,000                       |             |                    |        |
| 7 01 05 2.01 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                            |                                   |  | 200 Orang                              | 200 Orang | 25,600,000     | 15,000,100  | 15,000,100          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 200 Orang                         | 26,060,000  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 05 2.01 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  |                            |                                   |  | 200 Orang                              | 200 Orang | 35,650,000     | 0           | 0                   | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 200 Orang                         | 37,215,000  | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 05 2.01 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |                            |                                   |  | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen | 100,000,000    | 100,000,000 | 71,189,600          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 3 Dokumen                         | 110,000,000 | Kecamatan Caringin |        |
| 7 01 06         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | prosentase Desa yang berkinerja baik  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 103,426,694    | 55,076,600  | 55,076,600          |                                 |                                      |  | 100 %              | 115,608,303                       |             |                    |        |
| 7 01 06 2.01    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | %                          | %                                 |  | 100 %                                  | 100 %     | 103,426,694    | 55,076,600  | 55,076,600          |                                 |                                      |  | 100 %              | 115,608,303                       |             |                    |        |
| 7 01 06 2.01 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan  |                            |                                   |  | 2 Dokumen                              | 2 Dokumen | 26,462,094     | 15,001,700  | 15,001,700          | Kab. Garut, Caringin, Purbayani | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 2 Dokumen                         | 29,108,303  | Kecamatan Caringin |        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | <b>81</b> |
|--|-----------|

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                     | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |                      |                      |                      |  |                                       |  | Kelompok Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
|                 |  |  |                            |                                   |  | Target 2023                            |           | Pagu Indikatif       |                      |                      | Lokasi                                       | Sumber Dana                           | Prioritas  |                    | Target                            | Pagu Indikatif       |                                   |        |
|                 |  |  |                            |                                   |  | Semula                                 | Menjadi   | RKPD 2023            | APBD 2023            | RKPD 2023 Perubahan  |  |                                       | Nasional   |                    |                                   |                      |                                   | Daerah |
|                 |  |  |                            |                                   |  |  |           |                      |                      |                      |  |                                       |  |                    |                                   |                      |                                   |        |
|                 |  | Desa   |                            |                                   |  |  |           |                      |                      |                      |  |                                       |  |                    |                                   |                      |                                   |        |
| 7 01 06 2.01 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                               |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 25,000,000           | 0                    | 0                    | Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Dokumen                         | 30,000,000           | Kecamatan Caringin                |        |
| 7 01 06 2.01 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 31,964,600           | 25,074,800           | 25,074,800           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Dokumen                         | 35,000,000           | Kecamatan Caringin                |        |
| 7 01 06 2.01 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                            |                            |                                   |  | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen | 20,000,000           | 15,000,100           | 15,000,100           | Kab. Garut, Caringin, Purbayani              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          | 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur | Kecamatan Caringin | 1 Dokumen                         | 21,500,000           | Kecamatan Caringin                |        |
| <b>TOTAL</b>    |  |  |                            |                                   |  |  |           | <b>3,215,814,138</b> | <b>2,336,659,358</b> | <b>2,212,205,340</b> |  |                                       |  |                    |                                   | <b>3,552,959,460</b> |                                   |        |

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 82 |
|--|----|

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Caringin Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Caringin tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 83 |
|--|----|

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Caringin yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 84 |
|--|----|

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
  - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

|  |    |
|--|----|
|  |    |
|  |    |
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 85 |

4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong

|   |    |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 86 |
|---|----|

Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Caringin Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan, dalam merumuskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan Caringin adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 87 |

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Caringin Kabupaten Garut adalah Kecamatan Caringin Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Caringin Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 183 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 105 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Caringin Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:
  - a. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
  - b. Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD;
  - c. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah.
2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, dengan indikator:
  - a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif. Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Kecamatan Caringin Tahun 2023

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Caringin

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 88 |
|--|----|

Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:
  - a. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
  - b. Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD;
  - c. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah
  
2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, dengan indikator:
  - a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif. Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2023:

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Caringin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 1**

**Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Caringin Tahun 2023**

| <b>No</b>  | <b>Tujuan</b>                          | <b>Indikator Tujuan</b>    | <b>Sasaran</b>                                       | <b>Indikator Sasaran</b> | <b>Target</b> |
|------------|--|----------------------------|--|--------------------------|---------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>                             | <b>(3)</b>                 | <b>(4)</b>   | <b>(5)</b>               | <b>(6)</b>    |
| 1          | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan | Nilai SKM                | 82,75         |
| 2          | Meningkatnya                           | Prosentase                 | Meningkatn   | Nilai Sinergitas         | 75            |

|  |   |                                  |   |  |    |
|--|---|----------------------------------|---|--|----|
|  | Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | ya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan | Kinerja Kecamatan                                |    |
|  |   |                                  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan   | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | 90 |
|  |   |                                  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan          | Nilai SAKIP Kecamatan                            | CC |

*Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Caringin, 2023*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

|   |    |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 90 |
|---|----|

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023**

| No           | Perangkat Daerah   | Program  | Kegiatan  | Sub Kegiatan | Pagu                 |
|--------------|--------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|
| 1            | Kecamatan Caringin | 6        | 15        | 35           | 2,212,205,340        |
| <b>Total</b> |                    | <b>6</b> | <b>15</b> | <b>35</b>    | <b>2,212,205,340</b> |

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan;
4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 35 subkegiatan;

|  |    |
|--|----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 91 |
|--|----|

5. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,212,205,340,-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 3,215,814,138,-, mengalami penyesuaian sebesar Rp. 879.154.780,- pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 2,336,659,358,-, dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp. 124.454.018,-, menjadi sebesar Rp. 2,212,205,340,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut :

|  |    |
|--|----|
|  |    |
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 92 |

**Tabel 3. 3**

**Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01 Kecamatan Caringin

Sub Unit Organisasi : 7.01 Kecamatan Caringin

| Kode | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja  |                             |                   | Rencana Tahun 2023  |                        |         |                          |         |                |         |                         | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2024 |                              |               |  |  |  |               |
|------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|
|      |   | Capaian<br>Program | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                | Target Capaian Kinerja |         |                          |         |                |         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                    | Sumber<br>Dana                       | Target<br>Capaian<br>Kinerja |               | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu<br>Indikatif<br>(Rp.) |  |  |               |
|      |   |                    |                             |                   |   | Program                |         | Keluaran Sub<br>Kegiatan |         | Hasil Kegiatan |         |                         |                    |                                      | Tolak<br>Ukur                | Target        |  |  |  |               |
|      |   |                    |                             |                   |   | Sebelum                | Sesudah | Sebelum                  | Sesudah | Sebelum        | Sesudah | Sebelum                 |                    |                                      |                              |               | Sesudah  |  |  |               |
| 7    |   |                    |                             |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |                        |         |                          |         |                |         |                         |                    |                                      |                              |               |  |  |  |               |
| 7    | 0<br>1  |                    |                             |                   | KECAMATAN   |                        |         |                          |         |                |         |                         |                    |                                      |                              | 2,336,659,358 | 2,212,205,340  |  |  | 3,552,959,460 |
| 7    | 0<br>1  | 0<br>1             |                             |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                        |         |                          |         |                |         |                         |                    |                                      |                              | 1,735,811,358 | 1,680,192,840  |  |  | 2,580,185,838 |

|   |    |    |      |    |   |  |                       |                    |      |      |        |        |    |    |                      |                      |     |  |  |        |                      |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------------|--------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------|----------------------|-----|--|--|--------|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |  |                       |                    |      |      |        |        |    |    | <b>19,659,400</b>    | <b>15,887,000</b>    |     |  |  |        | <b>41,844,111</b>    |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 6 dok  | 6 dok  | CC | CC | 11,921,600           | 9,442,200            | DAU |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | 6 dok  | 22,000,000           |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 1 lap  | 1 lap  | CC | CC | 7,737,800            | 6,444,800            | DAU |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 lap  | 19,844,111           |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |  |                       |                    |      |      |        |        |    |    | <b>1,412,124,758</b> | <b>1,371,456,640</b> |     |  |  |        | <b>1,773,195,138</b> |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan   | Jumlah Orang                                     | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 10 org | 10 org | CC | CC | 1,404,014,35         | 1,363,466,74         | DAU |  | Jumlah   | 10 org | 1,753,695,138        |

|   |    |    |      |    |   |  |  |                       |                    |      |      |       |       |    |    |           |           |     |  |       |            |
|---|----|----|------|----|---|--|--|-----------------------|--------------------|------|------|-------|-------|----|----|-----------|-----------|-----|--|-------|------------|
|   |    |    |      |    | Tunjangan ASN   |  | yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | an                    |                    |      |      |       |       |    | 8  | 0         |           |     | Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |       |            |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 1 lap | 1 lap | CC | CC | 8,110,400 | 7,989,900 | DAU | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 1 lap | 19,500,000 |

|   |    |    |      |    |   |  |                       |                    |      |      |          |          |    |    |            |           |     |            |  |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------------|--------------------|------|------|----------|----------|----|----|------------|-----------|-----|------------|--|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|   |    |    |      |    |   |  |                       |                    |      |      |          |          |    |    |            |           |     |            |  | Keuangan Akhir Tahun SKPD |            |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              |  |                       |                    |      |      |          |          |    |    |            |           |     | 16,273,000 | 6,273,000  |                           |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,651,250 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 20 paket | 20 paket | CC | CC | 6,273,000  | 6,273,000 | DAU |            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 paket                  | 11,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang       | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 2 org    | 2 org    | CC | CC | 10,000,000 | 0         | DAU |            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas                       | 2 org                     | 26,651,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |            |



|   |        |        |          |        |   |  |                                 |                           |      |      |         |            |    |    |                |                |     |  |   |            |                 |  |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|---------------------------------|---------------------------|------|------|---------|------------|----|----|----------------|----------------|-----|--|---|------------|-----------------|--|
|   |        |        |          |        |   |  |                                 |                           |      |      |         |            |    |    |                |                |     |  |   | diak<br>an |                 |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>2 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor | Jumlah<br>Paket<br>Peralat<br>an dan<br>Perleng<br>kapan<br>Kantor<br>yang<br>Disedia<br>kan | Nilai<br>SAKIP<br>Kecamat<br>an | Kecamat<br>an<br>Caringin | 100% | 100% | 1 paket | 1<br>paket | CC | CC | 50,650<br>,200 | 73,192<br>,200 | DAU |  | Jum<br>lah<br>Pake<br>t<br>Peral<br>atan<br>dan<br>Perle<br>ngka<br>pan<br>Kant<br>or<br>yang<br>Dise<br>diak<br>an | 1<br>paket | 175,000,<br>000 |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>3 | Penyediaan<br>Peralatan<br>Rumah<br>Tangga            | Jumlah<br>Paket<br>Peralat<br>an<br>Rumah<br>Tangga<br>yang<br>Disedia<br>kan                | Nilai<br>SAKIP<br>Kecamat<br>an | Kecamat<br>an<br>Caringin | 100% | 100% | 1 paket | 1<br>paket | CC | CC | 7,094,<br>900  | 7,094,<br>900  | DAU |  | Jum<br>lah<br>Pake<br>t<br>Peral<br>atan<br>Rum<br>ah<br>Tang<br>ga<br>yang<br>Dise<br>diak<br>an                   | 1<br>paket | 19,648,0<br>00  |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>5 | Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan                   | Jumlah<br>Paket<br>Barang  | Nilai<br>SAKIP<br>Kecamat       | Kecamat<br>an<br>Caringin | 100% | 100% | 5 paket | 5<br>paket | CC | CC | 6,003,<br>600  | 6,003,<br>600  | DAU |  | Jum<br>lah<br>Pake  | 5<br>paket | 17,751,7<br>84  |  |



|   |        |        |          |        |   |  |   |                                 |                           |      |      |        |        |    |    |                |                |     |  |  |           |                 |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------|----------------|-----|--|--|-----------|-----------------|
|   |        |        |          |        | Tamu  |  | n<br>Fasilita<br>si<br>Kunjun<br>gan<br>Tamu  | Kecamat<br>an                   | Caringin                  |      |      |        |        |    |    |                |                |     | Lapo<br>ran<br>Fasil<br>itasi<br>Kunj<br>unga<br>n<br>Tamu |  |           |                 |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 0<br>9 | Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD |  | Jumlah<br>Lapora<br>n<br>Penyele<br>nggara<br>an<br>Rapat<br>Koordin<br>asi dan<br>Konsult<br>asi<br>SKPD | Nilai<br>SAKIP<br>Kecamat<br>an | Kecamat<br>an<br>Caringin | 100% | 100% | 12 lap | 12 lap | CC | CC | 49,920<br>,000 | 35,660<br>,000 | DAU |  | Jum<br>lah<br>Lapo<br>ran<br>Peny<br>elen<br>ggar<br>aan<br>Rap<br>at<br>Koor<br>dina<br>si<br>dan<br>Kons<br>ultas<br>i<br>SKP<br>D | 12<br>lap | 165,000,<br>000 |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>1 | 2.0<br>6 | 1<br>0 | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                       |  | Jumlah<br>dokum<br>en<br>Penata<br>usahaa<br>n Arsip<br>dinami<br>s pada<br>SKPD                          | Nilai<br>SAKIP<br>Kecamat<br>an | Kecamat<br>an<br>Caringin | 100% | 100% | 1 dok  | 1 dok  | CC | CC | 17,510<br>,600 | 17,510<br>,600 | DAU |  | Jum<br>lah<br>dok<br>ume<br>n<br>Pena<br>tausa<br>haan   | 1 dok     | 30,000,0<br>00  |

|   |     |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 |     |
|   | 100 |



|   |    |    |      |    |   |  |                       |                    |      |      |       |       |    |    |           |           |     |  |       |            |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------------------|--------------------|------|------|-------|-------|----|----|-----------|-----------|-----|--|-------|------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 1 lap | 1 lap | CC | CC | 9,000,000 | 9,000,000 | DAU | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 lap | 18,000,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 1 lap | 1 lap | CC | CC | 5,390,000 | 5,390,000 | DAU | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 1 lap | 12,567,500 |



|   |    |    |      |    |  |  |   |                       |                    |      |      |          |          |    |    |            |            |     |   |          |            |
|---|----|----|------|----|--|--|---|-----------------------|--------------------|------|------|----------|----------|----|----|------------|------------|-----|---|----------|------------|
|   |    |    |      |    | Dinas Jabatan  |  | Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                         |                       |                    |      |      |          |          |    |    |            |            |     | atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya     |          |            |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 3 gedung | 2 gedung | CC | CC | 49,010,800 | 49,010,800 | DAU | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 2 gedung | 49,996,809 |

|   |   |   |     |   |   |  |   |                            |                    |      |      |       |       |       |                 |                     |                |     |  |   |       |                 |
|---|---|---|-----|---|---|--|---|----------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|---------------------|----------------|-----|--|---|-------|-----------------|
| 7 | 0 | 0 |     |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |  |   |                            |                    |      |      |       |       |       | 120,41<br>9,400 | 104,7<br>51,40<br>0 |                |     |  | 237,582,<br>614   |       |                 |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 |   | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  |  |   |                            |                    |      |      |       |       |       | 110,41<br>9,400 | 94,75<br>1,400      |                |     |  | 210,813,<br>678   |       |                 |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 4 dok | 4 dok | 82,75 | 82,75           | 110,41<br>9,400     | 94,751<br>,400 | DAU |  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 4 dok | 210,813,<br>678 |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> |  |   |                            |                    |      |      |       |       |       | 10,000<br>,000  | 10,00<br>0,000      |                |     |  | 26,768,9<br>36  |       |                 |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada   |  | Jumlah Dokumen Perencana  | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 2 dok | 2 dok | 82,75 | 82,75           | 10,000<br>,000      | 10,000<br>,000 | DAU |  | Jumlah Dokumen  | 2 dok | 26,768,9<br>36  |



|   |        |        |          |        |   |  |  |                               |      |      |       |       |    |    |                        |                        |     |  |   |                                      |                        |  |
|---|--------|--------|----------|--------|---|--|--|-------------------------------|------|------|-------|-------|----|----|------------------------|------------------------|-----|--|---|--------------------------------------|------------------------|--|
|   |        |        |          |        |   |  | naan<br>Pemb<br>ngunan<br>di Desa  |                               |      |      |       |       |    |    |                        |                        |     |  |   | m<br>Foru<br>m<br>Mus<br>yaw<br>arah |                        |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>1 | 0<br>3 | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah<br>Kecamatan | Jumlah<br>Lapora<br>n<br>Pening<br>katan<br>Efektivi<br>tas<br>Kegiatan<br>Pember<br>dayaan<br>Masyar<br>akat di<br>Wilaya<br>h<br>Kecama<br>tan | Tingkat<br>Partisip<br>asi<br>Masyar<br>akat<br>dalam<br>Pemb<br>angunan | Kecam<br>atan<br>Caringi<br>n | 100% | 100% | 6 lap | 6 lap | 90 | 90 | 10,000<br>,200         | 10,000<br>,200         | DAU |  | Jum<br>lah<br>Lapo<br>ran<br>Peni<br>ngka<br>tan<br>Efek<br>tivita<br>s<br>Kegi<br>atan<br>Pemb<br>erd<br>ayaa<br>n<br>Mas<br>yara<br>kat<br>di<br>Wila<br>yah<br>Keca<br>mat<br>an | 6 lap                                | 38,975,0<br>05         |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>5 |        | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>           |  |  |                               |      |      |       |       |    |    | <b>31,200<br/>,000</b> | <b>15,60<br/>0,000</b> |     |  |   |                                      | <b>55,000,0<br/>00</b> |  |
| 7 | 0<br>1 | 0<br>3 | 2.0<br>5 | 0<br>2 | Penanganan<br>Covid-19 di   | Jumlah<br>Dokum  | Tingkat<br>Partisip  | Kecam<br>atan                 | 100% | 100% | 1 dok | 1 dok | 90 | 90 | 31,200<br>,000         | 15,600<br>,000         | DAU |  | Jum<br>lah  | 1 dok                                | 55,000,0<br>00         |  |

|   |    |    |      |    |   |  |  |                                  |                    |      |      |       |       |    |    |             |             |             |             |   |       |             |
|---|----|----|------|----|---|--|--|----------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|-------------|
|   |    |    |      |    | Tingkat Desa dan Kelurahan  |  | en Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                           | asi Masyarakat dalam Pembangunan | Caringin           |      |      |       |       |    |    |             |             |             |             | Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |       |             |
| 7 | 01 | 04 |      |    | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |  |  |                                  |                    |      |      |       |       |    |    |             |             | 262,000,200 | 253,383,100 |   |       | 323,332,700 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 |    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  |  |  |                                  |                    |      |      |       |       |    |    |             |             | 238,800,100 | 236,412,500 |   |       | 262,695,200 |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, | Sinergitas Kinerja Kecamatan     | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 2 lap | 2 lap | 75 | 75 | 188,800,000 | 187,831,400 | DAU         |             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian         | 2 lap | 207,695,200 |

|   |    |    |      |    |  |  |   |                    |      |      |       |       |    |    |            |            |     |  |  |       |            |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--------------------|------|------|-------|-------|----|----|------------|------------|-----|--|--|-------|------------|
|   |    |    |      |    |  |  | Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                    |      |      |       |       |    |    |            |            |     |  | n Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |       |            |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh | Sinergitas Kinerja Kecamatan  | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 1 lap | 1 lap | 75 | 75 | 50,000,100 | 48,581,100 | DAU |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hub   | 1 lap | 55,000,000 |







ahanan  
dan  
Pemelih  
araan  
Keutuh  
an  
Negara  
Kesatu  
an  
Republi  
k  
Indones  
ia

ar  
Nega  
ra  
Rep  
ubli  
k  
Indo  
nesi  
a  
Tahun  
194  
5,  
Pele  
stari  
an  
Bhin  
neka  
Tun  
ggal  
lka  
serta  
Pem  
erta  
han  
an  
dan  
Pem  
eliha  
raan  
Keut  
uha  
n  
Nega  
ra  
Kesa  
tuan  
Rep  
ubli  
k



|   |    |    |      |    |  |   |                              |                    |      |      |       |       |    |    |             |            |     |  |   |       |             |  |
|---|----|----|------|----|--|---|------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|----|----|-------------|------------|-----|--|---|-------|-------------|--|
|   |    |    |      |    |  |   |                              |                    |      |      |       |       |    |    |             |            |     |  |   | onal  |             |  |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                 | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 3 dok | 3 dok | 75 | 75 | 100,000,000 | 71,189,600 | DAU |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3 dok | 110,000,000 |  |
| 7 | 01 | 06 |      |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                |   |                              |                    |      |      |       |       |    |    | 55,076,600  | 55,076,600 |     |  | 115,608,303   |       |             |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |   |                              |                    |      |      |       |       |    |    | 55,076,600  | 55,076,600 |     |  | 115,608,303   |       |             |  |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi  | Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 2 dok | 2 dok | 75 | 75 | 15,001,700  | 15,001,700 | DAU |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi                            | 2 dok | 29,108,303  |  |

|   |     |     |      |    |   |  |  |                              |                    |      |      |       |       |    |    |            |            |     |  |  |       |            |
|---|-----|-----|------|----|---|--|--|------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|----|----|------------|------------|-----|--|--|-------|------------|
|   |     |     |      |    |   |  | Tata Pemerintahan  |                              |                    |      |      |       |       |    |    |            |            |     |  | dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan                              |       |            |
| 7 | 016 | 006 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 0 dok | 0 dok | 75 | 75 | 0          | 0          | DAU |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 1 dok | 30,000,000 |
| 7 | 016 | 006 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi  | Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 1 dok | 1 dok | 75 | 75 | 25,074,800 | 25,074,800 | DAU |  | Jumlah Dokumen   | 1 dok | 35,000,000 |

|   |    |    |      |    |  |  |   |                              |                    |      |      |       |       |    |    |            |            |     |   |       |            |
|---|----|----|------|----|--|--|---|------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|----|----|------------|------------|-----|---|-------|------------|
|   |    |    |      |    | Kemasyarakatan   |  | dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga               |                              |                    |      |      |       |       |    |    |            |            |     | Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga    |       |            |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Sinergitas Kinerja Kecamatan | Kecamatan Caringin | 100% | 100% | 1 dok | 1 dok | 75 | 75 | 15,000,100 | 15,000,100 | DAU | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 dok | 21,500,000 |



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) *Difteri* di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; v) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

|  |     |
|--|-----|
| <b>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023</b> | 119 |
|--|-----|

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

|   |     |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2023 | 120 |
|---|-----|